

# **Membangun Kedewasaan Berpolitik Dalam Menghadapi Pemilu 2009**

**Oleh:  
Ketut Gunawan**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Mulawarman

# Membangun Kedewasaan Berpolitik Dalam Menghadapi Pemilu 2009\*

Oleh: Ketut Gunawan\*\*

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah "Negara Pemilu", negara dengan banyak sekali Pemilu. Indonesia terdiri dari 440 Kabupaten/Kota; ini berarti Indonesia mesti menyelenggarakan 440 kali Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten/Kota. Propinsi Indonesia jumlahnya 33 buah, yang berarti jumlah pemilu tersebut mesti ditambah 33 kali. Jika ditambahkan pemilu Legislatif dan Pilpres, maka total Pemilu adalah 475. Dengan jumlah sebanyak ini maka dalam rentang waktu lima tahun, setiap tahunnya mesti diselenggarakan 95 kali pemilu atau 8 kali dalam sebulan atau setiap empat hari sekali. Jika semua tingkatan atau jenis pemilu tersebut jatuhnya dalam tahun yang sama, maka seorang penduduk di sebuah kabupaten bisa mencoblos minimal 4 kali dalam tahun (Pemilu legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbul/Pilkot). Kalau Pilpres, Pilgub, Pilbul/Pilwako masing-masing ada putaran kedua<sup>1</sup>, dan atau ada yang diulang (seperti di dua Kabupaten di Jatim), maka jumlahnya akan bisa bertambah dua kali lipat.

Jika jumlah pemilu tersebut ditambah dengan pemilihan langsung Kepala Desa di 62.806 desa<sup>2</sup> yang ada di seluruh Indonesia, maka setiap hari Indonesia menyelenggarakan 35 kali pemilihan (umum) langsung. Belum ada negara manapun yang memecahkan record ini. Jumlah pemilihan langsung tersebut tak bisa dibayangkan jika angka-angka tersebut ditambah dengan pemilihan Ketua-Ketua RT yang banyak dilakukan secara langsung, baik di Desa maupun di Kelurahan.<sup>3</sup>

Indonesia adalah juga "Negara Partai", negara yang melahirkan banyak sekali partai politik. Pada jaman Hindia Belanda, anggota Volksraad (Dewan Rakyat, 1931-1942) yang berkebangsaan Eropa berasal dari 8 partai (25 orang), penduduk pribumi 10 partai (30 orang), dan lainnya (Timur Asing) 2 partai (2 orang). Jadi totalnya adalah 20 partai. Pada Pemilu 1955, ada 102 partai (+/- 60 partai (organisasi), 58 'partai' perorangan). Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai, sementara Pemilu 1977-1997 oleh 3 partai. Perubahan signifikan terjadi pada Pemilu 1999, yang mana jumlah partai yang berkompetisi adalah 48 partai. Jumlah ini menurun pada Pemilu 2004 dengan 24 partainya, namun kemudian meningkat lagi pada Pemilu 2009 yang akan datang, yang diikuti oleh 44 partai (termasuk 6 partai lokal Aceh). Perkembangan jumlah partai yang pernah terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM (berdasarkan nomor urut) adalah:

---

\* Makalah dipresentasikan dalam Seminar dengan tema "Membangun Pendewasaan Berpolitik Masyarakat Menghadapi Pemilu 2009", di Hotel Tiara Surya, Bontang, 6 Desember 2008. Seminar yang diselenggarakan oleh Badan Kesbang Linmas Bontang ini dihadiri oleh pengurus/perwakilan partai-partai peserta Pemilu 2009.

\*\* Staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

<sup>1</sup> Pemilihan Gubernur Kaltim 2008 adalah Pilgub pertama di Indonesia yang memiliki putaran kedua.

<sup>2</sup> Jumlah Kelurahan di Indonesia adalah 7.113 buah (Ditjen PUM Depdagri n.d.)

<sup>3</sup> Sebagai contoh, Ketua RT dimana penulis tinggal (yang merupakan unit Kelurahan) dipilih secara langsung.

1999: 001-148; 2000: 149-153; 2001: 154-168; 2002: 169-237. Jadi mulai tahun 1999 sampai 2001, paling sedikit sudah terbentuk 237 partai (ada partai yang tidak mau mendaftar). Pada tahun 2004-2007, terdapat 87 partai yang mengajukan pendaftaran ke Departemen Hukum dan HAM dan menjelang Pemilu 2009 jumlah partai yang mendaftar untuk ikut Pemilu adalah 58 partai, yang sekitar separonya merupakan partai baru. Jadi, sejak jaman Hindia Belanda sampai sekarang, jumlah partai yang telah "diproduksi" Indonesia adalah sekitar 300-an partai, suatu jumlah yang nampaknya belum tertandingi oleh negara lain.

Indonesia bisa juga disebut sebagai "Negara Caleg". Dari data yang dikeluarkan oleh KPU (2004, 2008), dalam Pemilu 2004, jumlah Caleg DPR RI adalah 8.441 orang untuk memperebutkan 550 kursi. Dalam Pemilu 2004 ini, setiap parpol rata-rata mengajukan 352 Caleg-nya, dan rasio kompetisi Kursi:Caleg adalah 1:15,4. Dalam menyongsong Pemilu 2009, KPU telah mengumumkan calon legislatif (caleg) tetap (DCT) sebanyak 11.301 orang, yang terdiri dari 7.391 (65,40%) laki-laki dan 3.910 perempuan (34,60%). Jumlah caleg ini akan memperebutkan 560 kursi, yang berarti setiap parpol rata-rata mengajukan 297 caleg, dan rasio kompetisi Kursi:Caleg meningkat menjadi 1:20,3. Jumlah caleg di Indonesia akan melonjak drastis jika ditambahkan dengan caleg-caleg di 440 Kabupaten/Kota di 33 provinsi. Di Kota Bontang misalnya, jumlah Caleg tetap yang memperebutkan 25 kursi lebih adalah 510 orang (rasio 1:20), sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara, jumlah calegnya adalah 916 orang. Jika rata-rata Caleg setiap Kabupaten/Kota adalah 500 orang, Caleg Kabupaten Kukar 916 caleg,<sup>4</sup> maka total Caleg di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia adalah 220.000 orang. Jumlah caleg Provinsi Kaltim yang memperebutkan 55 kursi adalah 1.043 orang (rasio 1:18,9). Jika rata Caleg per provinsi adalah 1.000 orang, maka jumlah caleg provinsi di seluruh Indonesia adalah 33.000 orang. Secara keseluruhan, jumlah caleg di DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 264.301 orang, suatu jumlah yang tak ada yang menandingi. Jumlah ini belum termasuk jumlah calon anggota DPD

Parpol dan Caleg adalah aktor penting dalam Pemilu, terutama pemilu legislatif. Pemilu adalah sebuah pertarungan politik dalam – bahasa vulgarnya – perebutan kekuasaan di tiga level, Kabupaten, Propinsi, dan Nasional. Pertarungan ini menggunakan—kalau tidak menghabiskan—sumber daya politik (*political resources*) dan sumberdaya ekonomi (*economic resources*) yang demikian besar. Jika hasil atau output yang ditelorkan adalah minimal atau mengecewakan, maka banyak sumberdaya politik dan ekonomi yang terbuang percuma. Untuk itu adalah wajar jika sebagian besar penduduk Indonesia menuntut partai dan elit yang berlaga untuk menciptakan atau memberi sumbangan proses dan hasil yang maksimal, paling tidak optimal, akibat dari biaya politik dan ekonomi yang dikeluarkan.

Pemilihan langsung merupakan salah satu bentuk dari konsolidasi demokrasi sebab dengan pemilihan langsung rakyat bisa berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin dan wakil-wakilnya yang nantinya menjadi penentu arah kebijakan ekonomi-politik, baik nasional maupun lokal. Tapi dari realitas yang telah dan sedang berlangsung, banyak permasalahan yang muncul, baik ditinjau dari perspektif proses dan hasil. Beberapa yang utama adalah para elit sangat siap menang tapi tidak/belum siap kalah, konflik antar elit yang merembet ke konflik horizontal, trend menaik jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya (yang sering

<sup>4</sup> *Samarinda Pos*, 5 Nopember 2008.

diistilahkan dengan “Golput,” Golongan Putih), hasil penetapan KPU/KPUD yang sangat banyak digugat, dan cukup banyaknya para wakil rakyat yang “berurusan” dengan KPK dan pengadilan. Proses atau hasil pemilu seperti ini tentunya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan bagi sebagian kalangan yang pesimis ini dianggap sebagai kontra produktif terhadap proses yang diharapkan atau hasil yang ingin dicapai.

Salah satu kata kunci yang bisa memperkecil masalah dan memperbesar manfaat adalah adanya kedewasaan berpolitik (*political adolescent*) atau kematangan berpolitik (*political maturity*), baik di tingkat parpol, elit politik, penyelenggara pemilu, maupun di tingkat massa. Makalah ini lebih memfokuskan diri pada pembahasan kedewasaan atau kematangan berpolitik agar konsolidasi demokrasi di tingkat lokal bisa terwujud.

Bagian berikut dari makalah ini akan dimulai dengan pemaparan kerangka konseptual sebagai landasan untuk memperjelas bahasan, yang dilanjutkan dengan pemaparan gambaran umum pemilu dan demokratisasi di Indonesia, pemilu di Kaltim, permasalahan yang dihadapi, dan beberapa pendekatan dalam pendewasaan politik.

## **B. Kerangka Konseptual**

### **B.1. Pemilu dalam Konteks Pembangunan Politik**

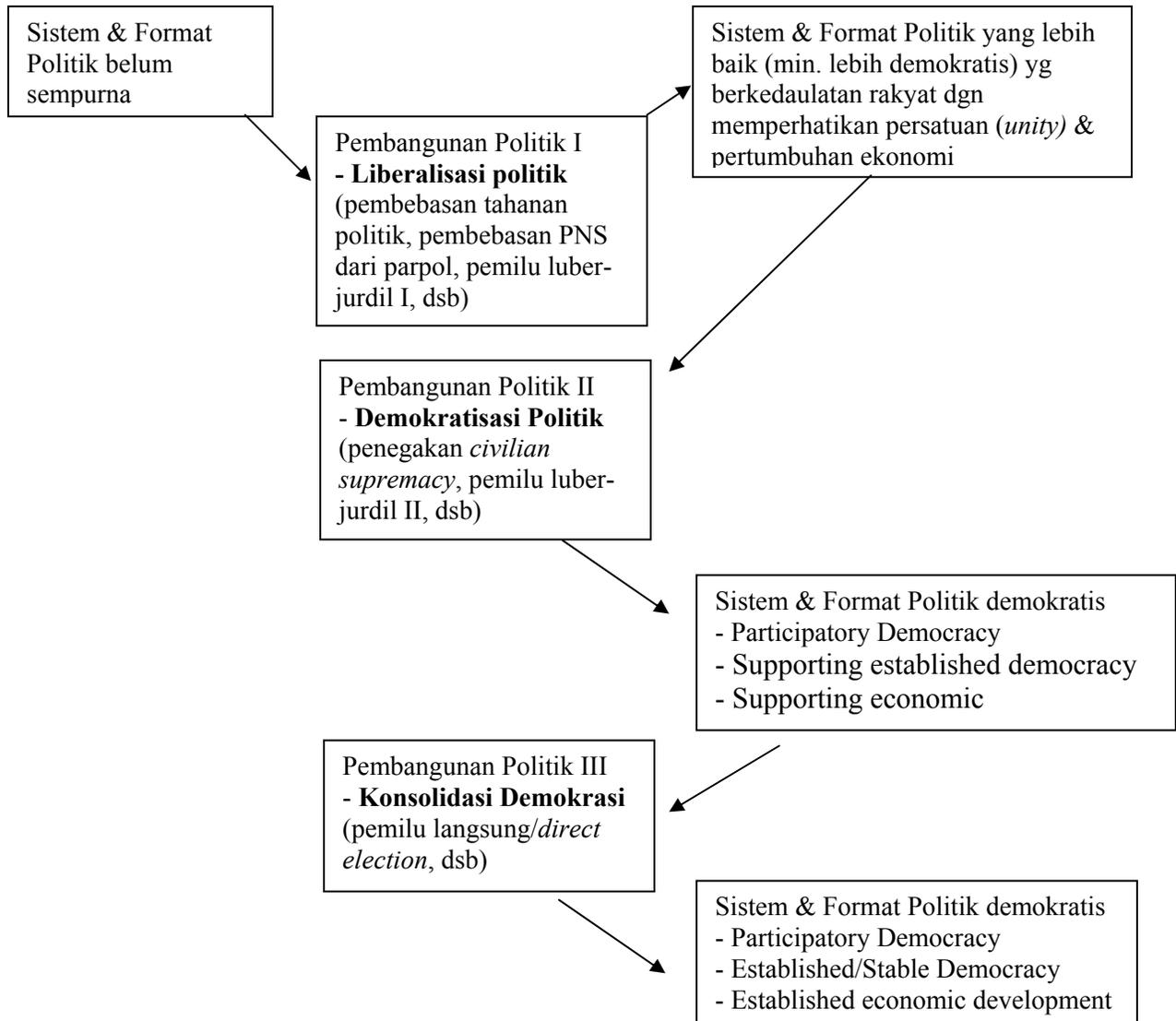
Pembangunan Politik pada dasarnya menyangkut tiga tema, yakni a) pembangunan negara/wilayah (*state building*) dan pembangunan bangsa (*nation building*), b) pembangunan format politik untuk mendukung pembangunan ekonomi, dan c) pembangunan demokrasi. Tiga tema besar pembangunan politik ini tidak hanya berlaku untuk tingkat negara tapi juga untuk tingkat lokal (propinsi, kabupaten/kota, dsb). Dalam kaitannya dengan pemilu ia banyak berhubungan dengan tema ketiga, namun tidak bisa lepas dari tema kedua dan ketiga.

Para ahli ilmu politik, membagi proses pembangunan demokrasi dari otoritarianisme ke demokrasi yang mapan (*established democracy*) menjadi tiga tahap, yakni liberalisasi politik, demokratisasi politik, dan konsolidasi demokrasi. Melaksanakan liberalisasi politik belum tentu berarti telah melakukan demokratisasi politik, tapi melaksanakan demokratisasi politik sudah pasti melakukan (didahului oleh) liberalisasi politik (Linz & Stepan 1996, 1997; Diamond 1999; Koppel 1993). Demokrasi yang sudah dibangun akan bisa terjaga (tidak kembali ke otoritarianisme) atau menjadi lebih maju lagi (mapan), bila dilakukan konsolidasi demokrasi (lihat Bagan I). Konsolidasi bisa dilakukan dengan banyak strategi atau melalui berbagai kebijakan, termasuk di dalamnya pemilihan langsung atau *direct/popular election* (mis. Pilkada langsung, Pilpres langsung, dsb.).

Menurut Linz dan Stepan (1996, 1997), konsolidasi demokrasi bisa ditinjau dari tiga aspek, yakni *behaviourally* (perilaku politik para elit yang menjunjung tinggi etika politik, dsb), *attitudinally* (sikap politik masyarakat yang menjunjung tinggi demokrasi, dsb), dan *constitutionally* (penyelesaian konflik dalam kerangka konstitusi, hukum, prosedur yang disepakati, atau institusi demokrasi). Demokratisasi dan konsolidasi demokrasi adalah proses panjang yang kadang-kadang batasnya sangat tipis. Dalam tahap demokratisasi dan konsolidasi demokrasi kadang-kadang ada juga keinginan-keinginan atau upaya-upaya untuk kembali ke otoritarianisme (termasuk sentralisasi kekuasaan) yang disebabkan oleh romantisme “keberhasilan” ekonomi atau “kestabilan” politik masa lalu. Jika demokrasi benar-benar terkonsolidasi, keinginan-keinginan atau upaya-upaya dimaksud tidak akan mendapat dukungan luas (mayoritas penduduknya) karena

keberhasilan atau kestabilan politik di bawah otoritarianisme penuh dengan rekayasa, sifatnya semu, atau tidak natural.

Bagan 1: Pembangunan Demokrasi



### ***B.1. Politik dan Pendewasaan Berpolitik***

Manusia tidak bisa lepas dari politik. Manusia telah berhubungan dengan politik sejak ia masih dalam kandungan (hak hidup dijamin/dilindungi oleh negara), ketika lahir, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai meninggal dunia.<sup>5</sup> Politik mengatur atau berhubungan dengan pengaturan arus lalu lintas kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan dan negara, eksistensi dan ekspresi individu (HAM dan penyaluran aspirasi), penciptaan tertib politik/masyarakat (*political order*), dan sebagai sarana atau

<sup>5</sup> Sebagai contoh, jika ada orang yang meninggal dunia dalam mana yang bersangkutan sudah tidak punya keluarga lagi atau tidak ada keluarga yang mengakui, maka negara wajib menguburkannya.

media penyelesaian konflik melalui peraturan-peraturan politik (mis. undang-undang), kebijakan-kebijakan politik, atau pendekatan-pendekatan politik. Jadi adagium bahwa "politik itu kotor" perlu dipertanyakan mengingat peran sentral dari politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik adalah netral.

Ada banyak definisi tentang politik (ilmu politik) yang dikemukakan oleh para ilmuwan politik. Ada yang mengatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam mencari, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Ada yang mengatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang negara, pemerintahan, dan sistem politik. Ada yang mengatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang parpol, ormas, pemilu, dan fakta serta kegiatan politik. Dan ada yang mendefinisikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Dari puluhan dan bahkan ratusan definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli, paling tidak ada enam sasaran (ilmu) politik, yakni negara, pemerintahan, kekuasaan, organisasi politik/masyarakat, fakta politik, dan kegiatan politik (Gie 1982, Roskin 2006).

Dalam terminologi politik, kedewasaan berpolitik merujuk pada istilah *political adolescent* (kedewasaan politik) atau *political maturity* (kematangan politik). Istilah-istilah ini berhubungan dengan sikap politik (*political attitude*) dan perilaku politik (*political behaviour*) individu dan lembaga (organisasi) (Krampen 2000, Carlos 2005, Rod 2008, Robi n.d). Penelusuran sederhana melalui kosa kata sudah memadai untuk mendapatkan pemahaman tentang istilah ini, dalam mana pendewasaan berpolitik menunjuk pada pengertian kedewasaan atau kematangan sikap dan perilaku individu, kelompok, dan lembaga/organisasi dalam berhubungan dengan negara, pemerintahan, kekuasaan, fakta-fakta dan kegiatan-kegiatan politik, serta dalam berorganisasi politik. Dengan pemahaman ini maka kedewasaan berpolitik tidak hanya berlaku atau hanya mesti dimiliki oleh masyarakat, tapi juga mesti dimiliki oleh lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi politik dan masyarakat (pemerintah, KPUD, Banwaslu, parpol, ormas, dsb). Jika kedewasaan berpolitik yang dimaksud adalah kedewasaan berpolitik masyarakat awam, maka ia mesti dipahami dari dua perspektif. Pertama, yang muncul dari dirinya sebagai sebuah ekspresi otonom atau kondisi obyektif individu-individu. Kedua, yang muncul sebagai akibat dari (atau respon terhadap) lingkungan di luar dirinya.

Pengejawantahan kedewasaan atau kematangan berpolitik sangat banyak dan bervariasi. Namun agar bahasan ini terfokus, ia akan dikaitkan dengan permasalahan-pemmasalahan krusial dalam pemilu, sebagaimana diuraikan di bagian-bagian berikut tulisan ini.

## **C. Gambaran Umum Pemilu**

### ***C.1. Pemilu dan Demokrasi di Indonesia***

Sejak merdeka, Indonesia sudah menyelenggarakan sembilan kali Pemilu (1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004) dan pemilu 2009 yang akan datang adalah merupakan pemilu ke sepuluh. Ini berarti bahwa Indonesia sudah memiliki banyak pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu. Sampai tahun 2004, Pemilu 1955 oleh ilmuwan politik masih dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia sebab Pemilu 1955 menawarkan tiga pilihan, yakni pemilihan anggota partai, pemilihan figur yang berafiliasi dengan partai, dan pemilihan figur yang tak berafiliasi dengan partai (calon independen). Pilkada-Pilkada sejak tahun 2005 yang

direvisi tahun 2008 (ketentuan calon independen), sudah menyamai pemilu 1955. Namun Pemilu legislatif nasional dan Pemilihan Presiden Nasional masih menutup peluang munculnya anggota parlemen dan presiden dari calon independen.<sup>6</sup>

Walaupun hasil pemilu menyisakan banyak masalah, tak dapat dipungkiri bahwa dengan pemilu, demokrasi makin berkembang. Walaupun arus yang mengarah ke sentralisasi dan oligarki partai cukup kentara, perjalanan demokrasi Indonesia boleh dikatakan masih *on the right tract*. Hal ini bisa dilihat dari *track record* perjalanan demokrasi Indonesia di mana menurut survey sebuah organisasi internasional, Freedom House, Indonesia telah digolongkan ke dalam negara dengan kebebasan politik paling tinggi atau negara yang demokrasinya paling maju di Asia Tenggara (lihat Tabel 1).

Tabel 1: Performance of Electoral Democracies, Political Rights, and Civil Liberties

Country	ED	PR	CL	Freedom Rating
Singapore		5	4	Partly Free
Malaysia		4	4	Partly Free
Vietnam		7	5	Not Free
Thailand	√	3 ∨	3	Partly Free
Philippines	√	3 ∨	3	Partly Free
Indonesia	√	2 ^	3	Free
Cambodia		6	5	Not Free
Myanmar		7	7	Not Free

Sumber: Freedom House (2006).

Catatan: - ED = Electoral Democracies (demokrasi dalam pemilu); PR=Political Rights (hak-hak politik); CL = Civil Liberties (kebebasan sipil).

- Skor rating dari 1 sampai 7, dimana 1 = The most free (paling bebas/demokratis) dan 7 = The least free (paling tidak bebas/demokratis)
- Tanda ∨ = decrease (menurun dari survey sebelumnya) ^ = increase (meningkat/naik)

Dari table tersebut, dapat pula disimpulkan bahwa pemilu (electoral democracies) menjadi salah satu penyumbang penting terhadap hasil penilaian *performance* demokrasi Indonesia. Hasil yang dicapai untuk kategori perlakuan hak-hak politik (*political rights*) dan kebebasan sipil (*civil liberties*) juga tidak dapat dilepaskan dari proses pemilu.

Pencapaian hasil tersebut bukanlah seperti membalikkan telapak tangan, melainkan melalui sebuah proses panjang dari otoritarianisme, liberalisasi politik, dan demokratisasi politik menuju ke proses konsolidasi demokrasi (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Regime Change and Democratisation in Indonesia

No	Regime Types	Period	Longevity	Phase/Stage	Process
1.	Soeharto's Regime (Authoritarian Rule)	11 March 1966 – 21 May 1998	32 years	Authoritarian	Authoritarian
2.	Habibie's Regime (Democratic Rule)	21 May 1998 – 20 October 1999	17 months	Early stage of democratisation	Democratic Transition (Liberalisasi Politik)

<sup>6</sup> Judicial review tentang Pilpres dari calon independen sedang dalam proses.

3.	Wahid's Regime (Democratic Rule)	20 October 1999 – 23 July 2001	21 months	Early stage of democratisation	Democratic Transition (Liberalisasi & Demokratisasi Politik)
4.	Megawati's Regime (Democratic Rule)	23 July 2001 – 20 October 2004	39 months	Consolidated stage of democratisation	Democratic Consolidation
6.	Yudoyono's Regime (Democratic Rule)	20 October 2004 – present	4 years, 2 months*	Consolidated stage of democratisation	Democratic Consolidation

Sumber: Gunawan (2004, 2005); Cf. Bertrand (2002).

Di tingkat lokal, upaya melakukan konsolidasi demokrasi—baik disadari atau tidak—juga telah dilakukan. Hanya saja, proses konsolidasi ini tidak berjalan mulus di semua daerah, dan bahkan ada kebijakan-kebijakan Pusat yang justru kontraproduktif terhadap upaya melakukan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

### ***C.2. Pemilu dan Demokrasi Lokal di Kaltim***

Sebagai bagian integral dari Indonesia, Kalimantan atau Kaltim khususnya juga mengikuti proses apa yang terjadi di tingkat nasional. Perbedaannya—dalam hal Pemilu—jika pada tahun 1955 Kalimantan memiliki partai lokal (seperti di Aceh sekarang), misalnya dengan adanya Partai Dayak Bersatu, setelah itu tidak ada lagi partai lokal.

Sebagaimana di daerah-daerah lain, geliat demokrasi lokal Kaltim mulai terlihat sejak 1998/1999, meningkat intensitasnya dalam pemilihan semi langsung legislatif dan pemilihan langsung eksekutif (Presiden) pada tahun 2004-2005, dan mencapai puncaknya pada Pilkada-Pilkada Kabupaten/Kota dan Provinsi yang diselenggarakan mulai tahun 2005 sampai 2008..

Pilkada-pilkada di Kaltim dan pemilihan langsung atau semi langsung di berbagai daerah—dalam teori demokratisasi—pada dasarnya merupakan upaya dari pemerintah nasional dan *civil society* untuk melakukan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, dengan memberi hak secara penuh kepada rakyat daerah untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen dan pemimpin-pemimpinnya di pemerintahan. Mengikutsertakan rakyat dalam pemilihan wakil-wakil dan pemimpinnya serta dalam menentukan arah perkembangan negara akan bisa melahirkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa mereka diminta pendapatnya untuk hal dimaksud sehingga bisa menguatkan loyalitas sukarela penduduk lokal terhadap pemerintahan nasional. Bila rakyat di daerah merasa proses pengaturan negara seperti itu adalah pilihan yang tepat, maka demokrasi lokal akan menjadi benteng dalam mempertahankan demokrasi nasional yang sedang dibangun terutama dalam menghadapi kekuatan-kekuatan otoritarianisme yang ingin membajaknya.

### **D. Permasalahan Krusial Pemilu**

Pemilu di Indonesia (nasional) dan di daerah-daerah memiliki banyak permasalahan, mulai dari kualitas, orientasi, dan kinerja dari "mantan" caleg-caleg jadi, keputusan hasil pemilu yang sering digugat, sikap kenegarawan elit yang dipertanyakan, pelanggaran-pelanggaran yang sudah dianggap biasa, dan lain sebagainya.

Mengingat fokus bahasan dari makalah ini sebagaimana disampaikan, paling tidak ada empat permasalahan utama yang bisa didiskusikan, yakni fenomena siap menang tapi tidak siap kalah, keputusan KPUD yang sering digugat, "golput", dan konflik antar elit yang merembet ke akar rumput.

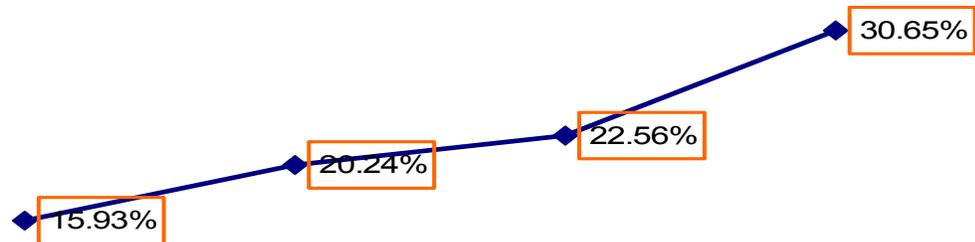
*Pertama*, Keputusan KPUD yang sering digugat. Menurut Kasubdi Ditjen Otda Depdagri, Kurniasih, sampai bulan Maret 2008, dari 345 Pilkada yang telah dilaksanakan (pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota), terdapat 180 kasus (52%) hasil pilkada yang digugat di pengadilan, yang terdiri dari 8 kasus untuk Pilgub, 146 kasus Pilbup, dan 26 kasus Pilwali/Pilwako. Hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan penetapan data pemilih, persyaratan calon tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat (mis. ijazah palsu), permasalahan internal parpol dalam pengusungan calon, KPUD yang tidak transparan, tidak independen, dan memperlakukan pasangan calon secara tidak adil dan tidak setara, adanya dugaan *money politics*, pelanggaran kampanye, penghitungan suara yang tidak akurat (JPNN, 3 Maret 2008), adanya upaya melakukan gerrymandering (lihat Lampiran 5-7). Namun permasalahan yang paling dominan adalah yang berkaitan dengan dugaan penggelembungan suara.

*Kedua*, "budaya" tidak legowo menerima kekalahan dan budaya menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan kecurangan (kurangnya budaya sebagai *gentleman/gentleperson*). Yang pertama bisa berdiri sendiri, tapi sering dipengaruhi oleh yang kedua. Adanya banyak sekali pelanggaran dalam setiap pemilu dan dominannya gugatan terhadap dugaan penggelembungan suara adalah indikasi yang tak dapat dinegasikan yang berkaitan dengan budaya *gentleperson*. Namun demikian, ada juga kasus-kasus yang tidak berhubungan dengan hal ini karena tidak legowo.

*Ketiga*, pihak-pihak yang berkonflik melakukan apa yang dinamakan *resource mobilisation* terhadap para *true believers*-nya yang kalau lepas kontrol (secara sadar atau tidak) bisa menimbulkan kebringansan massa, dan konflik horisontal antar pendukung. Para *by-stander* bisa juga mengambil kesempatan dengan melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari naluri sebagai makhluk sosial.

Keempat, fenomena meningkatnya dan tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (*turn out*), yang sering diistilahkan dengan "Golput". Dari 173 pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2005 di seluruh Indonesia, rata-rata "Golput"-nya adalah 30,65%. Angka ini lebih tinggi dari angka Golput dalam pemilihan legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II yang masing-masing persentasenya adalah 15,93%, 20,24%, dan 22,56% (lihat Bagan 2).

Bagan 2. Golput Dalam Pemilu



Pemilu Legislatif	Pemilu Presiden Putaran I	Pemilu Presiden Putaran II	Pemilihan Kepala Daerah
-------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------

Sumber: LSI JIP (n.d.)

Di Kaltim, angka “Golput” juga meningkat, dan mencapai puncaknya pada Pemilihan Gubernur tahap II, yang besarnya rata-rata 44,36% (Tabel 2).

Tabel 2. ”Golput” di Kaltim

No.	Kabupaten	DPR RI 2004	Pilkada 2005-2009	Pilgub Tahap II 2008
1.	Kab Pasir	-	-	44,01
2.	Kab Kutai Barat	-	57,40	49,46
3.	Kab Kukar	-	29,33	42,36
4.	Kab Kutai Timur	-	-	42,32
5.	Kab Berau	-	20,75	48,60
6.	Kab Malinau	-	22,27	41,35
7.	Kab Bulungan	-	27,25	51,29
8.	Kab Nunukan	-	-	44,99
9.	Kab Penajam Pasir Utara	-	25,61	46,94
10.	Kota Balikpapan	-	34,28	47,94
11.	Kota Samarinda	29,19	36,59	37,62
12.	Kota Tarakan	-	35,80	35,20
13.	Kota Bontang	-	25,15	44,54
	Rata-Rata	-	31,44	44,36**

\*Estrimasi (berdasarkan jumlah pemilih dalam pemilu sebelumnya, 2004-2005)..

\* Rata-rata jumlah “Golput” pada Pilgub I adalah 33% (739.255 orang dari 2.255.409 pemilih) (*Tempo Interaktif*, 11 Juni 2008).

Dalam teori demokrasi, “Golput” adalah anak dari demokrasi. Fenomena ini ada di mana-mana, di negara yang menerapkan demokrasi. Upaya-upaya menekan (menurunkan) angka “Golput” juga bukan merupakan langkah ilegal dalam kerangka demokrasi. Perdebatan tentang ini bisa tak berkesudahan; yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa lebih memahami sosok makhluk yang tidak asing lagi ini yang bernama “Golput”. Pemahaman yang keliru bisa melahirkan upaya-upaya yang keliru pula. Pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak semuanya bisa disebut Golput dalam terminologi Arief Budiman. Pemilih kategori ini sebenarnya bisa dibagi menjadi tiga kelompok besar, yakni mereka yang secara politik dan ideologis menolak sistem atau “ritual” pemilu, muak dengan output dari pemilu, dan sejenisnya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang pragmatis, yang beranggapan bahwa pemilu tidak akan mengubah keadaan mereka atau tidak memberi manfaat (secara langsung) pada mereka, terutama dari segi ekonomi, sehingga mereka menjadi apatis. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak memilih karena kendala teknis (tidak mendapat kartu suara, ketidakakuratan data pemilih, dan sejenisnya). Selain itu, ada lagi kelompok tambahan, kelompok keempat, yakni sebagian dari mereka yang dalam pemilu mencoblos tapi suaranya tidak sah. Beberapa di antara mereka bisa berarti Golput bila yang bersangkutan sengaja mencoblos secara salah namun malu dengan Ketua RT atau tetangga untuk tidak datang ke TPS. Alasannya bisa ideologis atau pragmatis. Yang disebut Golput sebenarnya adalah kelompok pertama (alasan politis-ideologis), kelompok kedua (alasan pragmatis), dan beberapa anggota kelompok keempat (alasan politis-ideologis dan pragmatis). Dengan tipologi seperti ini kiranya langkah-langkah menekan angka “Golput” bisa dilakukan. Kelompok pertama umumnya sukar ditaklukkan dan kelompok kedua tergantung dari kinerja parpol, perilaku elit-elitnya, dan manfaatnya bagi mereka.

## **E. Membangun Kedewasaan dalam Berpolitik**

Adanya kedewasaan dalam berpolitik bisa mengatasi—jika tidak meminimalisir—permasalahan-permasalahan krusial tersebut. Dua hal penting yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah orientasi politik peserta pemilu dan melakukan pendekatan yang lebih komprehensif.

### **1. Orientasi Politik**

Kedewasaan berpolitik akan lebih bisa diperoleh apabila terjadi perubahan orientasi politik, dari yang berorientasi kekuasaan (merebut kursi semata) ke yang berkaitan dengan pendidikan politik massa dalam rangka konsolidasi politik lokal. Dengan kata lain, orientasinya mesti berubah dari orientasi hasil semata ke proses atau proses-hasil. Jika sebuah partai berorientasi ke proses-hasil, walaupun nantinya kalah maka partai tersebut akan menyumbang dalam melakukan investasi politik.

### **2. Pendekatan-Pendekatan**

Paling tidak ada empat pendekatan yang bisa dilakukan dalam mendewasakan kegiatan politik yang berkaitan dengan pemilu, yakni pendekatan struktural, organisasional, institusional, dan aktor.

#### **a. Pendekatan Struktural**

Pendekatan struktural dipakai untuk memberi landasan bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi yang bisa mendukung perkembangan sektor-sektor lain. Pendekatan struktural yang paling penting dalam hal ini adalah membangun struktur ekonomi-politik. Ini bisa dilakukan dengan mengubah kondisi masyarakat, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan budaya berdemokrasi. Upaya ini merupakan investasi politik yang ke depannya bisa mengubah struktur ekonomi dan politik masyarakat yang lebih mapan secara ekonomi dan menerima nilai-nilai demokratis secara politik. Upaya ini umumnya merupakan program jangka panjang yang hasilnya mungkin baru akan kelihatan dalam beberapa tahun atau dekade

mendatang. Jika hal ini telah dilakukan jauh sebelumnya, maka ini bisa mengubah sikap, pandangan, dan perilaku politik masyarakat dalam merespon sebuah event politik kekinian.

#### *b. Pendekatan Organisasional*

Pendekatan ini menunjuk pada bagaimana menciptakan organisasi yang efektif, profesional, dan berkarakter. Pemerintah Daerah (birokrasi dan DPRD), KPUD, Bawaslu, partai politik, dan ormas-ormasnya mestinya menjadi motor dalam mendewasakan kematangan berpolitik semua pihak melalui pemberian contoh-contoh yang bisa jadi anutan.

#### *c. Pendekatan Institusional*

Dalam aliran neo-institutionalisme, organisasi dibedakan dengan institusi, dalam mana organisasi menunjuk pada lembaga yang kongkrit (Pemda, parpol, KPUD, ormas, dsb) sementara institusi adalah *rules of the games* atau aturan main, etika politik, norma-norma politik, atau kepatutan-kepatutan politik (North 1990). Kekuatan demokrasi di negara-negara yang maju demokrasi banyak terletak pada kepatuhan pada aturan-aturan yang tak tertulis berupa nilai-nilai kepatutan politik atau tata krama politik. Sebaliknya di Indonesia, fenomena umum yang sering bisa disaksikan adalah bagaimana mensiasati atau mencari celah-celah aturan tertulis—apalagi yang tidak tertulis—agar yang "ilegal" menjadi legal. Di sinilah pentingnya komitmen, *concern*, dan ketetapan hati dalam menjunjung nilai-nilai kepatutan politik yang mesti dijunjung tinggi. Hal ini akan mudah dilaksanakan atau dilakoni bila orientasi politik bergeser dari orientasi kekuasaan ke orientasi pendidikan politik guna mengkonsolidasikan demokrasi. Kesepakatan diri sendiri untuk menegakkan norma-norma politik akan jauh lebih bermakna dibandingkan dengan kesepakatan karena terpaksa, yang jika nantinya merasa dirugikan akan cenderung melakukan pelanggaran. Jika *rules of the games* sebagaimana disampaikan di atas dijunjung tinggi maka terciptalah budaya politik (*political culture*) yang kondusif bagi pengembangan demokrasi.

#### *d. Pendekatan Aktor*

Dalam Ilmu Politik, kajian tentang peran aktor kembali mendapatkan tempat setelah sekian lama "tergilas" oleh pendekatan sistem, struktural fungsional, dan pendekatan non-aktor lainnya. Ada agium politik: dalam statistik, jumlah individu sebagai sampel sangat penting; dalam politik, satu individu yang powerful bisa menentukan hitam-putihnya sebuah negara, jalannya peristiwa politik, dan sejenisnya. Ini berarti satu individu (sampel) sangat penting dan bisa berperan sentral dalam politik, sementara di statistik bisa diabaikan atau memiliki status marginal atau sama dengan yang lainnya.

Aktor di sini bisa berupa elit dan massa. Elit yang powerful bisa melakukan apa yang dinamakan *political resource mobilisation* (mobilisasi sumberdaya politik) untuk menggerakkan massanya. Jika resource yang dimobilisasi adalah unsur-unsur primordial dalam artian negatif (SARA), *grievances* (kekesalan, keresahan), dan "insting ekonomi" massa yang digalang, maka akibatnya bisa destruktif, terlebih kalau massa yang dimobilisasi adalah massa *the true believers* (pendukung fanatik).

Para elit mestinya faham akan apa-apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (yang mesti dihindari) menurut norma-norma kepatutan politik yang menjadi *concern* masyarakat umum. Massa itu sendiri mestinya juga tidak mudah terprovokasi atau dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan (fisik dan non-fisik) atau pelanggaran-pelanggaran norma kepatutan politik untuk kepentingan sesaat atau pribadi si elit.

### **Penutup**

Kedewasaan berpolitik dalam pemilu tidak hanya mesti dimiliki oleh masyarakat awam, tapi juga dalam diri parpol, elit politik, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan fasilitator pemilu.

Kedewasaan berpolitik ditunjukkan oleh sikap dan perilaku elit yang *gentle* dan memiliki sifat kenegarawanan; parpol yang lebih berorientasi pada proses atau proses-hasil daripada hasil semata; penyelenggara pemilu yang adil, transparan, penuh persiapan (matang), dan makin teliti; pengawas pemilu yang makin profesional; fasilitator yang tidak memihak dan menerima apapun hasil pemilu; massa yang memiliki partisipasi yang otonom, anti-kekerasan, dan tidak mudah terprovokasi; dan penyelesaian konflik pemilu dilakukan dengan elegan tanpa kekerasan.

Peran partai, penyelenggara pemilu, dan pemerintah sangat besar dalam melakukan pendewasaan politik masyarakat awam dan segmen-segmen lainnya (termasuk diri parpol, elit pemerintahan dan politik, dsb).

### Referensi

- Bertrand, Jacques. 2002. “*National Models*”, *Ethnonationalist Violence and Democratic Consolidation: An Analysis of Three Ethnonationalist movements in Indonesia*. Paper for delivery at the 2002 Annual Meeting of the American Political Science Association, August 29-September 1, 2002. Toronto: (Canada): Department of Political Science, University of Toronto.
- Gie, The Liang. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta
- Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
- Gunawan, Ketut. 2005. “Institutional Breakdown And The Rise of Conflicts During Indonesia’s Early Stage of Democratisation.” *Jurnal Sosial Politika* 6(11), 39-69.
- Gunawan, Ketut. *The Politics of the Indonesian Rainforest. A Rise of Forest Conflict during Indonesia’s Early Stage of Democratisation*. Goetingen (Germany): Cuvelier Verlag.
- Krampen, Günter. 2000. “Transition of Adolescent Political Action Orientations to Voting Behavior in Early Adulthood in View of a Social-Cognitive Action Theory Model of Personality”. *Political Psychology* 21(2), pp. 277-299.
- Koppel, Bruce. 1993. “The Prospects for Democratization in Southeast Asia: Local Perspective and International Roles.” *Journal of Northeast Asian Studies*, Vol. XII, No. 3, Fall.
- Kurniawan, Robi Cahyadi. 2007. *Pendewasaan Politik Dalam Pilkada*. <http://fisip-pemerintahan.unila.ac.id>
- Linz, Juan J., and Stepan, Alfred. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- \_\_\_\_\_. 1997. “Toward Consolidated Democracies.” In Diamond, Larry, *et.al.* (eds). *Consolidating the Democracies: Themes and Perspectives*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- North, Douglas C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.
- Roskin, Michael G. *et.al.* 2006. *Political Science: An Introduction*. Ninth Edition. New Jersey: Pearson Education International.
- Snyder, Jack. 2000. *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York, London: W.W. Norton & Company.

### Dataset

KPU Pusat (2004, 2008)

KPU-KPU Daerah (dalam paper-paper dan skripsi-skripsi mhs Fisip & PIN Unmul, 2006-2008)

Depdagri (n.d)

**Media Massa:**

Kompas, 2004,.2008.

Tempo, 2008.

Suara Pembaruan, 2008.

Media Indonesia 2004, 2008.

Sinar Harapan 2007

Website:

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), [www.cetro.org](http://www.cetro.org)

[www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id)

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

[www.freedomhouse.org](http://www.freedomhouse.org)

<http://deskpilkada.kaltimprov.go.id>

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pemilu Legislatif Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2004 (Enam Besar)

NO	KABUPATEN/ KOTA	Enam Besar Partai	DPR	DPRD Prov	DPRD Kab/Kota
1.	KUKAR	Golongan Karya	116.679	116.683	123.914
		Demokrasi Indonesia Perjuangan	27.252	25.306	24.865
		Keadilan Sejahtera	14.290	13.108	11.663
		Amanat Nasional	12.141	12.934	12.108
		Persatuan Pembangunan	11.746	11.543	10.570
		Patriot Pancasila	10.289	11.179	11.704
2.	BERAU	Golongan Karya	16.354	14.324	9.474
		Keadilan Sejahtera	8.161	8.046	6.462
		Persatuan Pembangunan	6.924	6.273	4.728
		Persatuan Demokrasi Kebangsaan	5.852	2.991	1.553
		Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.619	5.430	4.312
		Kebangkitan Bangsa	3.984	4.197	2.642
3.	PASER	Golkar	-	-	7 kursi
		PPP	-	-	5 kursi
		PDIP	-	-	3 kursi
		PKS	-	-	3 kursi
		PBB	-	-	2 kursi
		PDK	-	-	1 kursi
4.	SAMARINDA	Golkar	58.197	60.869	57.564
		PDIP	35.590	34.935	36.153
		PKS	38.147	35.043	34.598
		PPP	29.261	27.543	26.814
		PAN	21.274	23.298	22.649
		Demokrat	19.506	16.900	16.121
5.	BULUNGAN	Golongan Karya	10758	12090	4787
		Damai Sejahtera	6764	7489	2170
		Demokrasi Indonesia Perjuangan	5580	5730	2632
		Persatuan Pembangunan	3930	4143	1614
		Pelopor	2969	3644	999
		Amanat Nasional	2379	2363	815
6	BALIKPAPAN	Golongan Karya	51416	52025	49991
		Keadilan dan Sejahtera	32347	31572	28852
		Demokrasi Indonesia Perjuangan	30611	30669	26817
		Demokrat	20618	19053	16744

		Persatuan Pembangunan	18690	19656	17803
		Amanat Nasional	13811	13680	12921
7	BONTANG	Golongan Karya	14,660	13,456	17,381
		Keadilan Sejahtera	9,723	9,255	7,702
		Amanat Nasional	5,311	7,040	5,987
		Demokrasi Indonesia Perjuangan	5,129	5,134	4,209
		Persatuan Pembangunan	3,976	3,559	3,932
		Kebangkitan Bangsa	3,384	3,584	3,605
		Demokrat	2,904	2,683	2,467
8	PPU	Partai Golongan Karya	-	-	15,124
		Partai Demokrasi Indonesia	-	-	7,112
		Partai Kebangkitan Bangsa	-	-	5,937
		Partai Persatuan Pembangunan	-	-	4,837
		Partai Patriot Pancasila	-	-	4,292
		Partai Keadilan Sejahtera	-	-	4,216
9	KUBAR	PDIP	-	-	12.714
		GOLKAR	-	-	9.269
		PATRIOT	-	-	4.222
		PAN	-	-	4.059
		DEMOKRAT	-	-	3.776
		PPDK	-	-	3.734
10	KUTIM	Golongan Karya	-	-	16.148
		Demokrasi Indonesia Perjuangan	-	-	14.967
		Keadilan Sejahtera	-	-	6.737
		Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	5667
		Amanat Nasional	-	-	4.864
		Persatuan Demokrasi Kebangsaan	-	-	4.091
11	MALINAU	PDI P	-	-	6 kursi
		Golkar	-	-	5 kursi
		Pelopor	-	-	2 kursi
		PDS	-	-	2 kursi

		PPP	-	-	1 kursi
		PPDI	-	-	1 kursi
12	NUNUKAN	Golkar	-	-	13635
		PBB	-	-	10489
		PDIP	-	-	5775
		PDS	-	-	4097
		Kesatuan Bangsa	-	-	2163
		PPP	-	-	1829
13	TARAKAN	Partai Golkar	-	-	20502
		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	-	-	6777
		Partai Patriot Pancasila	-	-	6423
		Partai Amanat Nasional	-	-	4520
		Partai Bintang Reformasi	-	-	4398
		Partai Keadilan Sejahtera	-	-	4069

Sumber: Berbagai sumber (lihat Referensi)

#### Lampiran 2. Hasil Pilkada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur 2005-2008

No.	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	% SUA RA	Partai Pengusung	"Golput" [suara tak sah]
1.	KUTAI KERTANEGARA <b>01 Juni 2005</b>	Aji Sofyan Alex – H.M. Irkham	88.625	33.36	PAN dan PKS	110.241 (29,33%) [3804 (1,47%)]
		H.M. Tadjuddin Noor – H. A. Djabar Burkan	13.862	5.22	Partai Patriot Pancasila, PPP dan Partai Merdeka	
		Drs.H.Syaukani HR.MM – Drs.H.Syamsuri , MM	159.297	59.96	Partai Golkar	
4	BERAU <b>08 Agustus 2005</b>	Muharram – Wasisto	<b>23.357</b>		gabungan Partai	19.396 (20,75%) [865]
		Saukani – Abdul Kadir	<b>15.513</b>		gabungan Partai	
		Makmur HAPK – Achmad Rifai	<b>34.752</b>		gabungan Partai	
3	PASER <b>29 Juni 2005</b>	Sabarudin Yasin – Hj. Noorsinah	<b>2.224</b>		gabungan Partai	-
		H.M. Ridwan Suwidi – H.M. Hatta Garit	34.300		PPP	
		H. Ishak Usman – H.M.Aksa Arsyad	16.346		PKS, PBR dan Patriot Pancasila.	
		H.M.Adjmain K. – H. Sulaiman Eva Merukh	<b>9.701</b>		PDI?P	
		H. Yusriansyah Syarkawi – H.M. Mardikansyah	29.063		Partai Golkar, PBB, PDK dan PDIP	

5	SAMARINDA 19 September 2005	Drs. H. A. Amins, MM – H. Syaharie Jaang, SH	113.274	43,6	GOLKAR, PPP, PKB, PATRIOT, PELOPOR dan Partai Buruh Sosial Demokrat	-
		HS. Abdurrahman A. SE – Drs. Suryadi Hijrati	36.948	15,4	abungan Partai, Demokrat, PDS, PKPB, PNBK, Nahdlatul Umah Indonesia, Partai Merdeka,PPDI	
		H. A. Ferdian H, SE – Prof DR. Hj. S. Muriah	50.771	17,6	PDI ? P	
		H. Masykur Sarmian, S.Pdi – DR.H. Kasmiruddin	57.820	22,8	PKS	
2	BULUNGAN 27 Juni 2005	Drs. H. Budiman Arifin Drs. Liet Ingai, M.Si	17.971	36,45	PAN, Partai Pelopor dan PKB	18568 (27,25%) [184]
		H. Abd. Djalil Fatah, SH Obed Bahwan	15.819	32,09	Partai Golkar	
		H. Joesoef Abdulah, SH Nikodimus	4.938	10,02	PBSD, Partai Merdeka, PPDK, PNBK, Demokrat, PKPI, PPDI, PPNUI, PKPB, PBR, PSI dan PPD	
		H. Enci Muhammad Yunus, SE, MM Drs. PO Singal	10.572	21,44	PDS, PNI Marhaenis dan PIB	
10	BALIKPAPAN 28 Maret 2006	H.Jamal N,SH dan Ir.H. Priyono D,MT	13.416		gabungan partai, PPP, Demokrat, dan Demokrasi Kebangsaan	118.398 (34,28%) [5155 (0,01%)]
		H. Imdaad Hamid.SE dan H.M. Rizal E,SE	122.330		Partai PDI Perjuangan, PKB, Patriot Pancasila, Partai Keadilan dan Persatuan Bangsa, Partai Karya Peduli Bangsa	
		H.M. Ismet A dan Totok S,SH	13.744		abungan Partai, PDS, PBB, Pelopor, PPDI, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, PBSD, PPNUI, PNI Marhaenis, PPIB, PAN, dan PPD	
		H. Mukmin F.HP.,SH dan Ir. Gunawarman. M.AP	72.326		gabungan Partai, Golkar, PKS, PBR, PKPI dan PNBK	
7	BONTANG 30 Januari 2006	Zulkifli Arman- Suroyo	22.818		PAN, PKB, Demokrat dan Partai Patriot Pancasila.	23.832 (25,15%) [776]
		Gunawan-Nukman	14.130		gabungan Partai, PDI-P dan PKS	
		Sofyan-Sjahid	25.818		gabungan Partai,	

					GOLKAR, PBSB, PDK dan didukung oleh suara Partai Merdeka, PNUI, PNIM, Partai Pelopor, PDS dan PSI.	
		Yamin-Adam	7.359		gabungan Partai, Patriot Pancasila, PBB, dan didukung suara PBR, PPIB, PKPB, PPD, PKPI, PNBK dan PPDI	
	PPU	- Drs. H. Yusran Aspar, M.Si -Drs. H. Susuianto	22.495	32,20		24.059 (25.61%)
		H. Ihwan Datu Adam, SE - Drs. H. Nursyamsa Hadis	13,457	19,26		
		H. Abdul Mutalib, SH, M.Si - Sujius, S.Pd	6.118	8,76		
		H. Andi Harahap - Drs. H. Mustaqim MZ, MM	27,799	39,79		
8	KUBAR 20 Februari 2006	Ir. Rama A. Asia H. Encik Mugnidin B.Sc	: 22.849 suara	28,4 %	gabungan Partai, PDS, Demokrat, Pelopor dan PPKK	
		Drs. Agustinus Markus, MM H. Hermain D, BA	: 10.198 suara	12,7 %	gabungan Partai, Patriot Pancasila, PPP, PKPI, PKPB, PNIM, PPDI, PNBK, PBSB, PBB, PSI dan PKB dan PSI.	
		Ismael Thomas, SH. Didik Effendi, S.Sos	: 27.668 suara	34,4 %	gabungan Partai, PDIP dan PAN	
		Abdul Azis, SE, MM Drs. Amon Nereng	: 19.797 suara	4,6 %	Partai Golkar	
6	KUTIM 12 Desember 2005	Abdal Nanang – Mujiono	4.247		Gabungan Partai	-
		Mahyuddin – Ardiansyah Sulaeman	31.906		Gabungan Partai	
		Irsyadi – Nur Aeni Rahman	1.416		Gabungan Partai	
		Awang Faruq I – Isran Noor	66,190		Gabungan Partai	

9	MALINAU 23 Februari 2006	H. Syamsuri / Kilit Laing	195		Gabungan Partai, PP, PPDI, Patriot Pancasila dan PKB	8080 (22,27%)
		Ir. Frederick Bid, M. Si / Ir.H. Amir Fauzi	8.089		Gabungan Partai, PAN, PKPB, PBR, PBSB, Partai Merdeka, PPIB, Demokrat dan PKS	
		DR.Drs. Marthin Billa, MM / H. Dt. Nasir, SH. MAP	19.869		Gabungan Partai, PDIP, Golkar, PDS dan Partai Pelopor	
11	NUNUKAN	H. Abdul Hafid Achnad & Drs. Kashmir Foret MM	30.097		Gabungan Partai, PBB dan PKS	N/A
		Hj. Asmah Gani & Mohd.Amin Syawal P, BBA	16.372		Partai Golkar	
		Mashur bin Mohd. Alias, SH & Pdt. Yepta Berto STh	11.263		Partai, PDK, PBR, PARTAI PELOPOR, PSI, DEMOKRAT, PFPI, PDS dan PKB.	
		Ir. H. Yakub, MP & H. Arufudin Ali	1.645		Gabungan Partai, PAN dan PDI-P	
	TARAKAN					
	23-10-2008	Andi Lolo & Zainal Arifin	9142	11,82		44.435 (35,8%)
		Samson Djakaria & Rakhmat Madjid	3454	4,46		
		Ibrahim -Agus Wahono	28383	36,69		
		Anang Dachlan- Jumain	19987	25,83		

Sumber: Berbagai sumber (lihat Referensi)

### Lampiran 3. Hasil Pemilihan Pilgub I Kalimantan Timur, 2008

No	Kabupaten	Drs. H. Awang Faroek Ishak, Mm, M.Si Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd	Ir. H. Nusyirwan Ismail, M.Si H. Heru Bambang, SE	Drs. H. Achmad Amins, Mm H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si	Dr. H. Jusuf Sk Luther Kombong	Golput (%)
1.	Kab. Berau	18.059	7.116	23.072	21.385	-
2.	Kab. Bulungan	12.707	6.920	14.982	16.180	-
3.	Kab. Kutai Barat	23.081	21.527	11.560	14.689	-
4.	Kab. Kutai Kertanegara	82.223	45.899	60.918	73.902	-
5.	Kab. Kutai	49.706	7.810	17.792	22.336	-

	Timur					
6.	Kab. Malinau	7.570	7.140	4.444	5.836	-
7.	Kab. Nunukan	5.624	4.181	21.830	23.364	-
8.	Kab. Pasir	28.560	16.389	23.770	19.269	-
9.	Kab. Penajam Paser Utara	20.561	11.855	15.581	21.544	-
10.	Kota Balikpapan	53.594	58.601	62.047	50.745	-
11.	Kota Bontang	18.980	10.075	19.769	12.795	-
12.	Kota Samarinda	95.945	77.639	98.388	47.565	-
13.	Kota Tarakan	9.715	5.797	22.631	41.619	-
	Total Suara	426.325 (28,09 %)	280.949 (19,04 %)	396.784 (26,90 %)	371.229 (25,16 %)	33

\* Rata-rata jumlah "Golput" pada Pilgub I adalah 33% (739.255 orang dari 2.255.409 pemilih) (*Tempo Interaktif*, 11 Juni 2008).

#### Lampiran 4. Hasil Pemilihan Pilgub I Kalimantan Timur, 2008

No.	Kabupaten	Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd	Drs. H. Achmad Amins, MM H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si	Golput (%)
1.	Kab Pasir	44.001	29.795	44,01
2.	Kab Kutai Barat	41.775	16.035	49,46
3.	Kab Kutai Kertanegara	143.572	82.239	42,36
4.	Kab Kutai Timur	68.814	24.374	42,32
5.	Kab Berau	29.906	26.799	48,60
6.	Kab Malinau	17.551	4.408	41,35
7.	Kab Bulungan	21.639	15.307	51,29
8.	Kab Nunukan	25.282	24.490	44,99
9.	Kab Penajam Paser Utara	25.505	23.962	46,94
10.	Kota Balikpapan	102.267	83.112	47,94
11.	Kota Samarinda	158.189	140.451	37,62
12.	Kota Tarakan	34.906	40.065	35,20
13.	Kota Bontang	27.317	26.643	44,54
	Total Suara	740.724 (57,94%)	537.680 (42,06%)	44,36**

Sumber: Berbagai sumber (lihat Referensi)

## Lampiran 5. Fenomena Gerrymander Dalam Pemilihan Umum



Beberapa species Salamander



Elbridge Gerry  
(Gubernur Massachusetts, AS)

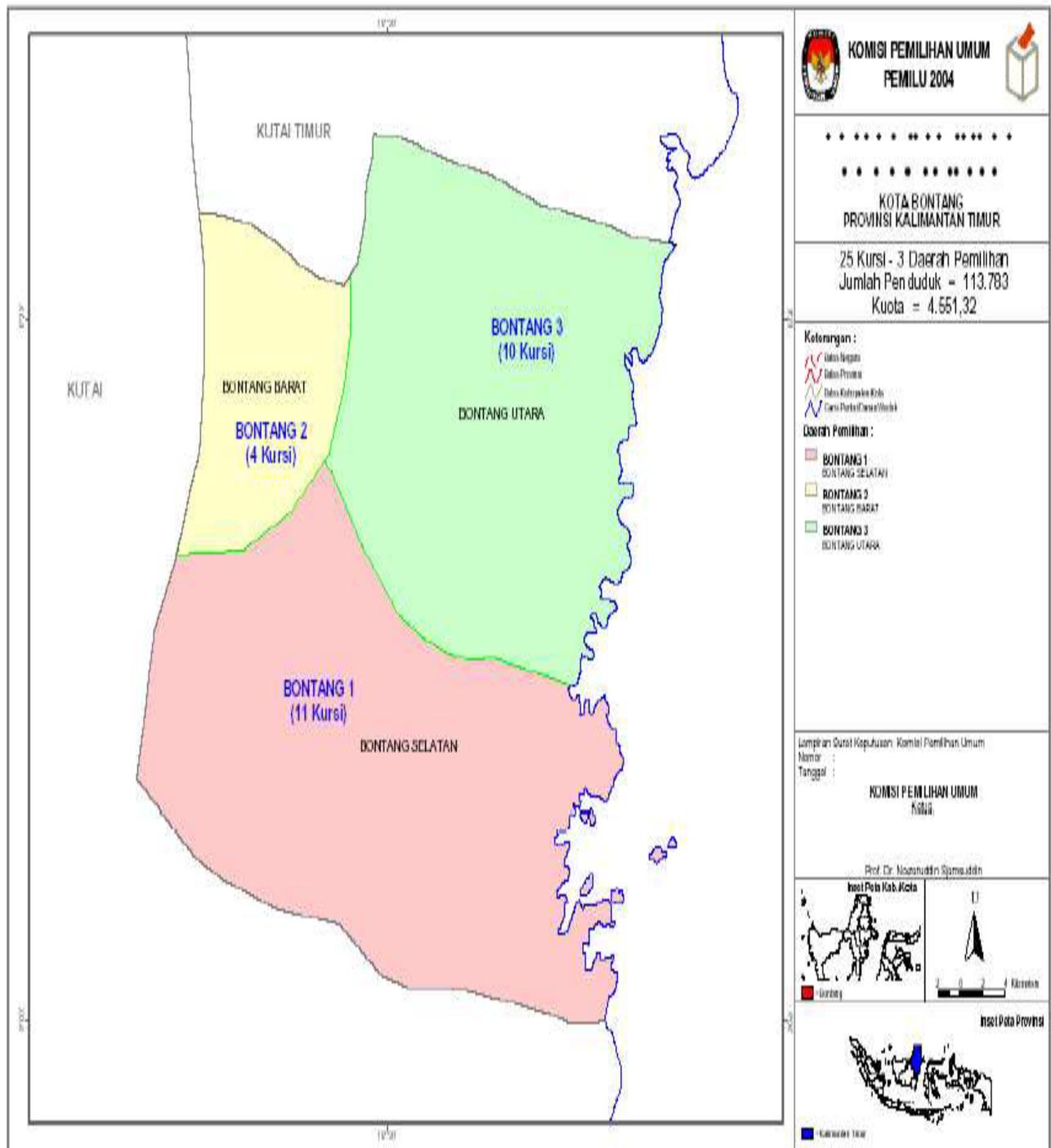


Sumber images:  
Microsoft Encarta,  
Internet (Wikipedia, etc)

**1892: Elbridge Gerry + Salamander = Gerrymander**

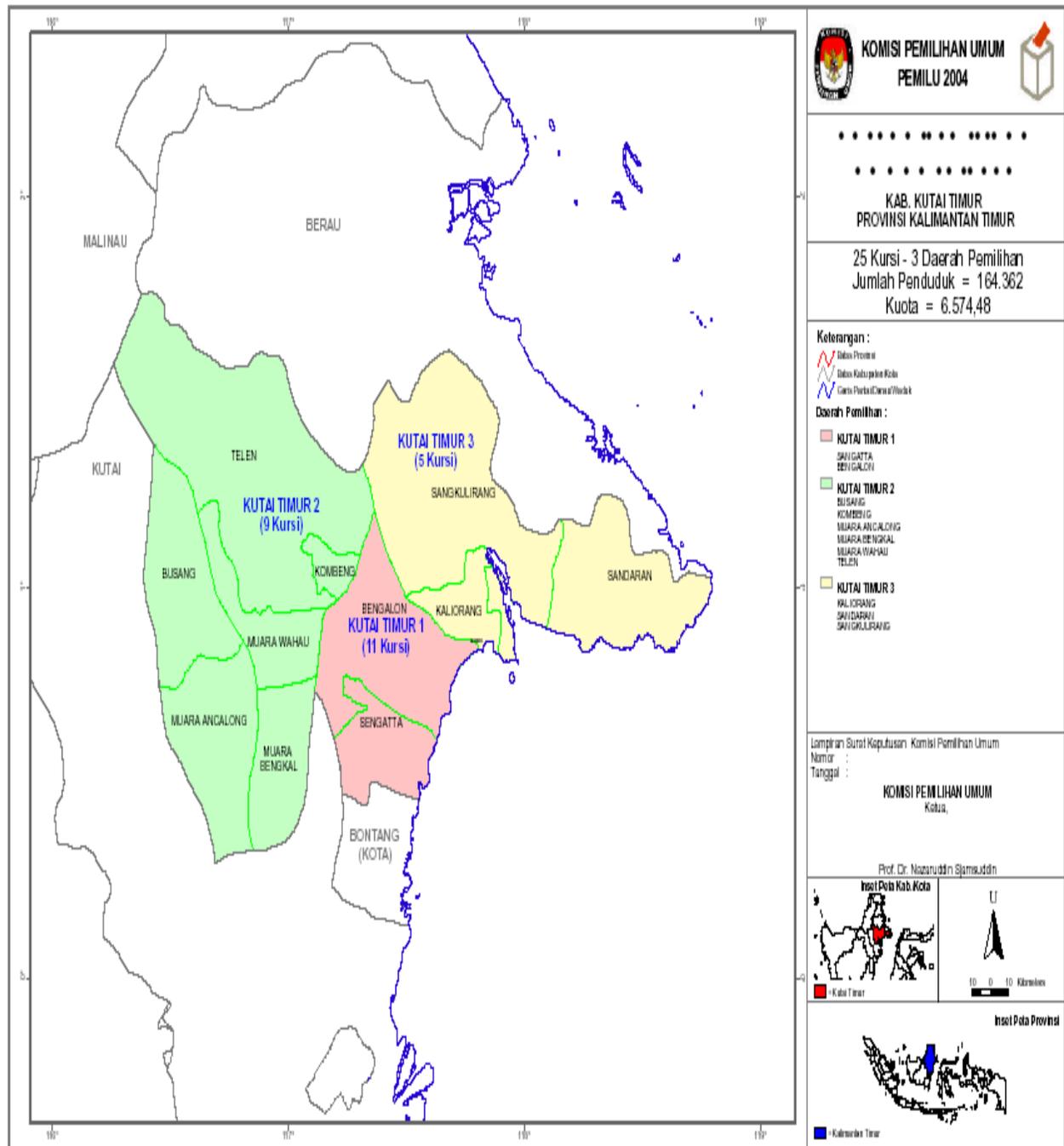
**Gerrymander:** Perubahan (menggambar ulang) daerah pemilihan yang dilakukan oleh Elbridge Gerry dengan memasukkan pendukung/konsituennya ke dalam daerah/distrik pemilihannya sehingga peta daerah pemilihan menyerupai Salamander.

Lampiran 6. Daerah Pemilihan Kota Bontang



Sumber: KPU 2004.

## Lampiran 6. Daerah Pemilihan Kabupaten Kutai Timur



Sumber: KPU 2004.

**Catatan:**

Varian fenomena *Gerrymander* atau *Gerrymandering* bisa ditemukan di wilayah jalan poros Bontang-Sangatta (secara geografis sangat dekat dengan Kota Bontang, tapi secara administratif pemerintahan merupakan wilayah Kabupaten Sangatta).